

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)

Moch Alam Hamzah Fahrezi¹, Ahmad Zaki Fadlur Rohman²

^{1,2} Universitas Brawijaya
Malang, Indonesia
alamhamzahfahrezi@gmail.com
(corresponding author)

ABSTRAK

Partai politik di Indonesia menempati peringkat sebagai lembaga yang paling tidak dipercayai oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah bahwa partai politik belum mampu menginstitutionalisasi organisasi mereka dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses institutionalisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang dan hubungannya dengan hasil pemilihan. Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori Institutionalisasi Partai Politik oleh Randall dan Svasand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSI Kota Malang mencapai model institutionalisasi dua tingkat, di mana dua tingkat memiliki tingkat institutionalisasi yang tinggi, sementara dua tingkat lainnya memiliki tingkat institutionalisasi yang rendah. Secara deskriptif, tingkat sistem dan tingkat infusi nilai masih jauh dari ideal, sementara tingkat otonomi keputusan dan tingkat citra publik (reifikasi) memiliki tingkat institutionalisasi yang relatif tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara institutionalisasi PSI Kota Malang terhadap hasil pemilihan legislatif 2019 di mana tingkat reifikasi cenderung memengaruhi peningkatan suara partai, sementara tingkat infusi nilai cenderung memengaruhi penurunan suara partai.

Kata Kunci: Institutionalisasi; Partai Politik; Pemilu Legislatif; PSI

PENDAHULUAN

"You can have election without democracy, but you can't have democracy without election", sebuah kutipan dari Ramlan Surbakti (2016). Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokratis dimana tata kelola pemerintahannya dibuat dan dilakukan berdasarkan kehendak rakyat. Kuasa rakyat tersebut dinyatakan dalam pemilihan umum (pemilu) yang bukan hanya terselenggara secara berkala tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sebuah agenda penting dimana di dalamnya terdapat partai politik yang berpartisipasi untuk mendapatkan kekuasaan serta penjabatan antara publik dengan pemerintah.

Jika berbicara tentang partai politik, Indonesia sendiri memiliki sejarah kelam hingga reformasi mengubahnya menjadi multipartai. Menginjak fase baru, pertumbuhan partai diredam melalui aturan yaitu *parliamentary threshold*. Dengan begitu, maka memberikan suatu tantangan sendiri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang akan mendirikan partai politik untuk benar benar mementingkan kualitas partai. Hal ini sangat korelatif dengan fakta yang terjadi saat ini dimana partai politik dianggap "*lack of quality*" yang dibuktikan dengan kualitas partai politik yang selalu menjadi lembaga demokrasi yang paling tidak dipercaya oleh publik

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang cenderung turun setiap tahunnya disebabkan oleh partai politik yang tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh partai politik yang belum mampu

melembagakan partainya dengan baik. Pelembagaan Partai Politik merupakan proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil yang mewujud dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam partai (Randall dan Svasand, 2002).

Penelitian terkait pelembagaan partai politik sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Suryana dkk (2020); Wanto (2021); dan Lutfi (2018). Suryana dkk (2020) menganalisis proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung yang berfokus pada empat derajat pelembagaan yaitu sistem, nilai autonomi, dan reification. Wanto (2021) menganalisis pelembagaan partai politik khususnya derajat kesisteman dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa secara internal, proses pelembagaan Partai Gerindra kota Tangerang belum terlembaga dengan maksimal. Lutfi (2008) menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui pelembagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dan menemukan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun pelembagaan partai yang kuat. Meskipun topik penelitian sejenis sudah dilakukan sebelumnya, penelitian ini mengangkat tema kelembagaan partai politik untuk menganalisis partai politik yang relatif baru di Indonesia yaitu Partai Solidaritas Indonesia dengan locus di kota Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melihat proses pelembagaan partai baru yang eksentrik di awal kemunculannya yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Partai ini membawa dimensi baru dan berbeda dalam dunia perpolitikan di Indonesia. PSI mencitrakan dirinya sebagai partai milenial dan anak muda dengan harapan mampu mengembalikan nilai luhur perpolitikan di Indonesia yang menurut mereka sudah melenceng dari demokrasi. PSI bisa dibilang juga *anti mainstream* partai karena memperjuangkan hak perempuan, lintas agama bahkan non-muslim. Bagaimanapun, visi misi yang dibawa oleh PSI tak semata mata bisa meloloskan dirinya ke Senayan. Peraturan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu menghalangi PSI untuk menjadi bagian dari legislatif pusat. Pemilu 2019 disepakati bahwa *Parliamentary Threshold* sebesar 4%. Hal itu berarti, partai politik yang memperoleh suara dibawah 4% gagal menjadi partai lolos di Senayan.

Dari 16 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2019, terdapat 7 partai yang belum lolos, salah satunya PSI yang menempati urutan 5 terbawah. Walaupun belum lolos menembus kursi DPR tetapi beberapa anggota PSI dapat menembus DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Salah satunya adalah di DPRD Kota Malang yang mana salah satu anggotanya adalah jebolan PSI. Merupakan sebuah kebanggaan bahwa PSI Kota Malang bisa dibilang eksis di Kota Malang.

Peneliti akan lebih mendalami pelembagaan PSI khususnya di DPD Kota Malang. Peneliti melihat pelembagaan PSI Kota Malang menggunakan persilangan antara dua aspek yang akan memunculkan empat dimensi yang dikemukakan oleh Randall & Svasand (2002) yaitu (1) *Systemness* (2) *Decisional Autonomy* (3) *Value Infusion* (4) *Reification*. Empat dimensi tersebut merupakan persilangan dari aspek struktural-attitudinal dan internal-eksternal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelembagaan Partai atau *Party Institutionalization* is the process by which the party becomes established in terms both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture atau suatu proses di mana partai memantapkan dirinya sesuai dengan pola perilaku dan sikap serta budaya partai yang terintegrasi. .

Randall and Svasand (2002) membedakan aspek internal dan eksternal kaitannya dengan proses pelembagaan partai politik. Dimana aspek internal akan menjelaskan tentang perkembangan partai politik itu sendiri sedangkan aspek eksternal akan menjelaskan tentang hubungan partai dengan publik. Dalam masing masing aspek akan disilangkan dengan aspek struktural dan attitudinal. Aspek Struktural lebih dimaksudkan kepada pelembagaan organisasi yang kaitannya dengan aturan formal. Aspek Attitudinal merujuk pada fusi dari tingkah laku, sikap dan budaya.

Dengan framework di atas akan menghasilkan empat indikator/ matriks sederhana yaitu:

Tabel 1. Indikator Pelembagaan Partai Politik

<i>Dimension</i>	<i>Internal</i>	<i>Eksternal</i>
Structural	<i>Systemness</i>	<i>Decisional Autonomy</i>
Attitudinal	<i>Value Infusion</i>	<i>Reification</i>

Sumber: Randall dan Svasand , 2002

Systemness, merupakan kegiatan dimana partai politik melaksanakan fungsi fungsi partai politik menurut prosedur, persyaratan, aturan formal yang disepakati dan tentunya telah tersurat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara menyeluruh. Serta prosedur informal seperti *Faksionalisme*, *Klientelisme* dan senioritas.

Value Infusion, dimana ketika organisasi terinfusi dengan nilai di luar persyaratan teknis tugasnya sebagai anggota partai. Dalam derajat ini sangat berkaitan dengan keanggotaan, basis sosial pendukung dan *impact* dari klientelisme.

Decisional Autonomy, merupakan seberapa jauh ketergantungan partai terhadap aktor luar partai. Secara harfiah, *Decisional Autonomy* memiliki makna apakah dalam suatu partai terdapat campur tangan pihak eksternal (dengan sumber otoritas tertentu) di dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan serta proses pembiayaan.

Reification, mengacu kepada sejauh mana keberadaan partai berlabuh dalam imajinasi publik dan membentuk perilaku aktor politik. Reifikasi mencerminkan kemampuan partai dalam membangun diskursus (*political discourse*) atas identitas diri partainya di sebuah negara (Rohman, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti untuk merinci suatu fenomena dengan sebanyak mungkin kedalaman pemahaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam melalui proses pengumpulan data yang serinci mungkin (Lexy, 2006). Sebagaimana diutarakan oleh

Creswell (2013), penelitian kualitatif yang berkualitas tinggi ditandai oleh kemampuannya untuk merinci dan merumuskan fenomena yang diteliti dengan mendalam.

Dalam konteks ini, sumber data utama berasal dari wawancara sebagai bentuk data primer, yang memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman informan secara langsung. Wawancara dipilih karena memberikan ruang bagi interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Selain wawancara, penggunaan dokumentasi sebagai sumber data sekunder juga mendukung kekayaan informasi dalam penelitian ini. Dokumentasi, seperti arsip, catatan, atau laporan terdahulu, memberikan konteks historis dan mendukung pemahaman mendalam terhadap fenomena yang tengah diinvestigasi.

Dalam pemilihan informan, peneliti melakukan pendekatan purposive sampling, yang melibatkan pemilihan informan berdasarkan keahlian atau pengalaman spesifik yang relevan dengan fenomena penelitian (Patton, 2002). Informan dalam penelitian ini adalah 5 informan dari kantor DPD PSI Malang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi dan ketepatan terhadap tujuan penelitian.

Adapun analisis data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan yang muncul dari data (Miles & Huberman, 1994). Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga memahaminya dengan mendalam.

Dengan demikian, melalui kombinasi wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data, serta penggunaan metode analisis yang sistematis, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan berkualitas terkait fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat *Systemness*

Dimensi *Systemness* berkaitan erat dengan bagaimana proses partai politik dalam konteks internal dan struktural. Internal sendiri akan dibahas mengenai seluk beluk pelebagaan Internal PSI Kota Malang jika dilihat dari aturan dan nilai yang dianut oleh PSI. Sesuai dengan amanat AD/ART bahwa PSI adalah Partai Kader, hal tersebut memunculkan kebingungan karena berbanding terbalik dengan nilai nilai PSI.

Partai kader merupakan rangkaian lebih lanjut dari suatu partai yang memiliki keanggotaan berasal dari golongan kelas menengah ke atas (Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat) maka partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi masa (Amal, 1988). Atas hal itu, ideologi tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai PSI Kota Malang sebagai Partai modern dan berlandaskan Ilmu Pengetahuan.

Jika menelisik lebih dalam lagi tentang aspek historis dari partai kader, rekrutmen dan kaderisasi seharusnya dilakukan secara ketat serta adanya jenjang pengkaderan. PSI Kota Malang dalam melakukan perekrutan secara terbuka dan sangat mudah. Hanya

mengisi atau mengumpulkan berkas data diri dengan tanpa syarat dan tanpa seleksi khusus maka langsung diberi Kartu Tanda Anggota PSI.

Dengan keterbukaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh PSI Kota Malang, memunculkan kebingungan sebenarnya PSI berdinamika sebagai partai kader atau sebagai partai massa? Partai massa lebih mengedepankan kuantitas kader sehingga disebut “massa” serta mengesampingkan kualitas yang penting sebanyak mungkin kader yang ada.

Rekrutmen tentunya berkaitan erat dengan kaderisasi, PSI Kota Malang sendiri memiliki platform terkait kaderisasi anggotanya yaitu “Sekolah Kader”. Pada level ini, peneliti menemukan bahwa PSI Kota Malang belum mengimplementasikan kaderisasi. Jejaring dan jenjang kaderisasi hanya berbasis pada struktur pengurus dan pendaftar bacaleg yang akan mengikuti ajang *electoral* 2024. Padahal secara gamblang tertulis bahwa PSI adalah Partai Kader, tentunya jenjang pengkaderan harus ada untuk seluruh anggota mulai dari DPP hingga DPC.

Jika kaderisasi hanya dikhususkan untuk segelintir orang saja, maka tidak akan membuka kesempatan bagi anggota yang lain untuk berdinamika politik atau bahkan menjadi pengurus. Lagi lagi berlawanan dengan modal awal PSI yaitu wadah berpolitik orang baru anak muda yang mana seharusnya diberikan pendidikan politik secara *massif* sehingga “orang baru” ini dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dalam tubuh organisasi.

Masih berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi, sejak berdirinya di 2014, PSI mewajibkan anggota atau kadernya bersumber dari orang-orang baru (politik baru), tidak pernah terlibat masalah kriminal apalagi korupsi serta untuk pengurus wajib dibawah 45 tahun. Namun, walaupun menyatakan dirinya sebagai partai politik dari kalangan biasa, statement itu dipatahkan oleh masuknya Jeffry Geovanie di PSI bahkan langsung menduduki posisi Ketua Dewan Pembina DPP PSI serta sudah berusia 47 tahun saat itu. Seperti yang kita tahu, *track record* Jeffrie Geovanie adalah seorang politikus lama era reformasi yang mana beberapa kali menduduki jabatan di tiga (3) partai berbeda yaitu PAN ke Golkar setelah itu ke Nasdem dan terakhir bergabung di PSI. Begitu juga adanya dengan Sunny Tanoewidjaja di jajaran dewan pembina yang merupakan eks staf Ahok dimana pada saat itu pernah dicekal KPK karena kasus reklamasi. Yang terbaru adalah Dhohir Faris, suami Yenny Wahid (Putri Gus Dur) yang memutuskan bergabung dengan PSI di awal tahun ini, yang mana dulunya ia merupakan anggota DPR RI Periode 2009-2014 dari Partai Gerindra.

Tidak luput dari inkonsistensi itu, PSI Kota Malang pun tidak membantah bahwa banyak kadernya yang mempunyai *track record* dari partai lain dengan berdalih hal itu adalah dinamika politik, jika menjadi pengurus partai lain dan mempunyai DNA PSI maka boleh saja menjadi kader PSI.

Lebih lanjut lagi, peneliti menemukan ketidaksesuaian PSI Kota Malang dengan aturan (AD/ART) melalui kelengkapan partai yaitu tidak adanya organisasi sayap partai dan dewan pembina daerah. Alasan tidak dibentuknya sayap partai adalah minimnya dana operasional. Dikatakan bahwa pembiayaan sayap partai sama dengan pembiayaan operasional.

Namun, berbagai persoalan internal dan ketidaksesuaian antara aktivitas DPP PSI dan PSI Kota Malang dengan aturan dan nilai yang diperjuangkan, hemat peneliti masih banyak program dan aktivitas yang menjanjikan. *Pertama*, kemudahan dan keterbukaan pola rekrutmen yang dilakukan secara *Online* dan *Offline*. Perekrutan anggota dan bakal calon legislatif dilakukan secara transparan oleh PSI Kota Malang, transparan yang dimaksud adalah memberikan informasi *massif* dan memadai kepada masyarakat tentang metode dan proses perekrutan anggota dan bacaleg. Perekrutan bacaleg sangat mudah bahkan dengan adanya politik tanpa mahar memudahkan publik untuk mendaftar. *Kedua*, yaitu perekrutan caleg dilakukan secara ketat melalui seleksi bertahap yaitu uji administrasi, uji kelayakan dan wawancara.

Dalam *systemness*, suatu partai dikatakan terlembaga dengan baik jika sumber nya berasal dari sistem gotong royong atau iuran wajib para anggota, tetapi apabila sumber pendanaan hanya pada orang tertentu atau sumber pribadi bisa dikatakan partai tersebut elitis.

Dalam prakteknya, DPD PSI Kota Malang mengalami kesulitan dalam segi keuangan. Yang harus digaris bawahi disini adalah akses keuangan yang masuk dalam kantong PSI hanyalah bersumber dari dana hibah saja, padahal dana tersebut tidak menutupi semua pembiayaan partai, apalagi kampanye yang besarnya bisa melebihi biaya operasional. Dalam AD/ART pun disebutkan bahwa terdapat iuran wajib yang dibebankan kepada seluruh anggota, tetapi program tersebut belum diberlakukan di DPD PSI Kota Malang. DPD PSI Kota Malang selama ini untuk memenuhi operasionalnya mengandalkan dana hibah dan dana pribadi dari pengurus, khususnya ketua. Sedangkan untuk kegiatan baru diberlakukan bantingan atau patungan seluruh anggota.

Temuan lain yang berkaitan dengan derajat *systemness* adalah suksesi dan kepemimpinan. DPP PSI memegang kendali penuh terhadap pemilihan ketua DPD yang mana syaratnya terbilang sedikit dan berat yaitu siapapun ketua partai harus mampu memenuhi operasional dari semua kebutuhan di tingkat daerahnya. Maka dari itu cara yang dipilih oleh DPP PSI dalam menentukan ketua DPD/DPW adalah dengan menunjuk seseorang yang sekiranya mempunyai *resource* atau mampu memenuhi kebutuhan DPD. Hal ini menunjukkan bahwa pola yang digunakan oleh PSI cenderung elitis bahkan kurang demokratis. Bahkan adanya pola tersebut membuat di beberapa daerah atau DPD sampai saat ini belum memiliki ketua.

Berkaitan dengan kepemimpinan, Ketua DPD PSI Kota Malang memiliki tanggung jawab yang besar diikuti dengan wewenang yang amat besar pula. Ketua memiliki hak penuh terhadap pemilihan struktural dan mempunyai wewenang mutlak terhadap pemilihan bacaleg yang akan maju ke elektoral. Temuan peneliti yaitu perekrutan pengurus dilakukan secara penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme atau seleksi, kader kader yang dipilih cenderung diutamakan kader militan partai, bukan dari kompetensi spesialisasi sesuai jobdesk.

Karena memiliki hak memilih bacaleg yang akan maju dalam Pileg, Ketua DPD PSI Kota Malang juga mewajibkan seluruh pengurus DPD untuk maju dalam kontestasi politik tersebut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya konflik kepentingan serta mengindikasikan proses pengkaderan yang dilakukan oleh DPD PSI Kota Malang tidak maksimal. DPP PSI konsisten memisahkan antara mengurus partai dan mengurus

perpolitikan. Penggagas PSI mengupayakan terjadinya pemisahan strukturisasi administrasi dan politik sehingga tidak akan timbul *overlapping* yang dilakukan oleh politisi yang empiris administrasi. (Aruan dkk, 2022)

Sekalipun memiliki hak yang amat besar, Ketua DPD PSI Kota Malang, Achmad Faried ketika pengambilan keputusan cenderung melibatkan orang banyak. Apalagi memang keputusan tersebut perlu dilakukan musyawarah. Tetapi memang kebanyakan pengambilan keputusan dilakukan ketua bersama pengurus karena Ketua DPD lebih menginginkan koordinasi yang cepat. Menurutnya, terlalu banyak orang berarti terlalu lama dan terlalu banyak yang dikoordinasikan.

Derajat *Value Infusion*

Temuan peneliti, DPD PSI Kota Malang memiliki basis sosial yang beragam tetapi cenderung tidak spesifik. Jika mengesampingkan kampanye yang dibawa oleh bacaleg, PSI Kota Malang, tidak menekankan kepada siapa yang akan di "*infuse*" nilainya. PSI menyasar seluruh lapisan masyarakat, agama, ras dan etnis. Tidak ada kewajiban basis sosial mana yang harus diperjuangkan sesuai amanat yang ada. Hemat peneliti, PSI Kota Malang akhirnya pun sama dengan partai lain di Indonesia yang mana umumnya masih kesulitan menemukan basis sosial yang spesifik.

Jika dikaji lebih jauh lagi, tidak spesifiknya basis sosial PSI Kota Malang disebabkan nilai-nilai yang dibawa PSI cenderung baru dan tabu yang bisa dikatakan juga "*out of the box*" sehingga masih sedikit kelas populis yang memiliki nilai dan kepentingan yang serupa. Serta tidak adanya sayap partai semakin menunjukkan bahwa PSI Kota Malang tidak ada organisasi sosial yang diperjuangkan.

DPD PSI Kota Malang sempat menyasar kelompok pekerja sopir dengan membantu melegitimasi kelompok mereka, ikut menyuarakan pendapat mereka. Hubungan antara PSI Kota Malang dengan kelompok sopir angkutan bersifat instrumental yaitu sama-sama mengharapkan materi dan non-materi dari kedua belah pihak. Sopir angkutan mendapatkan legalitas kelompoknya dan dukungan sedangkan PSI Kota Malang mendapat dukungan dalam konteks kampanye.

Jika sebelumnya mengenai basis sosial yang diperjuangkan. *Value infusion* juga berkaitan dengan penanaman nilai yang ada di diri pengurus dan anggota PSI Kota Malang. Peneliti menemukan bahwa nilai yang dibawa PSI berhasil menarik seseorang untuk bergabung dengan partainya melalui aspek historis alasan bergabung dengan PSI. Kelima narasumber cenderung beralasan sama yaitu secara garis besar sebelumnya apolitis menjadi politis. Juga kelima narasumber memiliki pemikiran dan pandangan yang sama tentunya mengacu pada nilai yang diperjuangkan oleh PSI. Sehingga bisa disimpulkan nilai yang dibawa PSI relatif tertanam dalam aktivitas dan perilaku pengurus dan kader PSI Kota Malang

Derajat *Decisional Autonomy*

Decisional Autonomy atau Derajat Otonomi partai berkorelasi dengan kemandirian partai politik dalam pembuatan atau pemilihan keputusan dan kebijakan yang tidak terpengaruhi oleh hubungannya dengan sumber otoritas dan sumber dana.

Dalam sub bab ini memiliki pertanyaan utama, Apakah PSI Kota Malang dapat independen dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi dari aktor luar.

Terkait dengan jejaring serta aktor politik, temuan peneliti di PSI Kota Malang menunjukkan sisi positif. Jejaring Politik antara PSI Kota Malang dan sumber otoritas terbilang masih di taraf sehat, dimana PSI tidak memiliki ikatan timbal balik. Sumber otoritas tidak mengintervensi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh PSI Kota Malang (otonom dalam pembuatan kebijakan).

Begitu juga dengan jejaring politik PSI Kota Malang dengan sumber dana juga menunjukkan kecenderungan positif. Sumber dana berarti pemberi dana, entah berbentuk uang dan non-uang yang sah di mata hukum. Sumber dana eksternal dalam PSI Kota Malang berasal dari Dana Bantuan Bakesbangpol, simpatisan dan donatur baik berbentuk lembaga atau personal. Aktor atau lembaga pemberi dana untuk internal partai tidak memengaruhi pembuatan kebijakan dan pemilihan keputusan.

Tidak memiliki jejaring politik juga merupakan sebuah tantangan, lagi lagi mengenai pendanaan, dukungan dan koalisi. Hingga saat ini PSI Kota Malang tidak memiliki jejaring yang banyak, karena terbilang masih menjadi partai muda dan masih berintegritas sesuai nilai dan DNA PSI.

Derajat Reification

Reification atau Derajat pengetahuan/citra publik adalah level dimana partai politik tersebut dianggap ada dan tertanam dalam imajinasi publik. Level kemenangan dari derajat *Reification* ini adalah apabila keberadaan partai telah tertanam dalam imajinasi public, sehingga individu atau lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan sikap politiknya kepada partai politik tersebut.

Kehadiran partai seharusnya membawa dampak baik kepada masyarakat bukan hanya sekumpulan elit yang sama sekali tidak terhubung dengan rakyat. Di awal kehadirannya saat itu, PSI cukup membuat geger publik karena isu isu yang cukup nyentrik dan “*open minded*”. Dengan membawa target publik milenial sebagai *key constituents*, PSI berani berbeda memperjuangkan isu isu yang sebenarnya tabu dalam politik. Setiap sikap non populis yang dilahirkan PSI pasti selayaknya membanjiri ruang publik (Ferdian, 2018). Isu yang membuat PSI menjadi dikenal masyarakat yaitu, agama, hak asasi manusia, pluralism, kesetaraan dan keadilan gender.

Isu isu kontroversial tersebut secara tak langsung mendapat perhatian publik dan publik otomatis terimajinasi dengan PSI, sehingga elektabilitas partai pun meningkat. Maka dari itu “***bad news is a good news***”. Pernyataan pernyataan yang dilontarkan kader PSI tersebut secara cepat mendapat respon dari masyarakat yang “kontra” hingga menimbulkan dampak negatif bagi partai. Dampak negatif tersebut berupa pelaporan dan munculnya *hoax*, berita bohong atau disinformasi. Aksi tersebut cukup merugikan partai.

Kepopuleran PSI atas “kontroversi” nya berbuah manis. Dibanding partai partai baru saat itu. ketenaran PSI relatif memuaskan sebagai partai baru. Cara pasti melihat elektabilitas partai adalah dengan melihat data elektoral. Elektabilitas PSI Kota Malang dapat terlihat pada saat Pileg 2019. Sebagai partai baru pada saat itu, PSI dapat mendulang 19.447 suara yang berarti mendapat 3% lebih suara dari keseluruhan DPT Kota Malang. Atas hasil

tersebut, PSI Kota Malang dapat merebut satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Strategi sosialisasi PSI sebesar 80% melalui *social media* seperti *Instagram*, *Website Resmi*, *Facebook*, *Youtube* dan *Twitter* sekaligus mengejar target konstituennya yaitu anak muda milenial (Tanton, 2019). Tetapi di PSI Kota Malang mencitrakan dirinya ke publik lebih banyak menggunakan cara cara tradisional yaitu berinteraksi dengan masyarakat dengan membuat program kerja yang turun langsung ke masyarakat seperti pembagian rice box, pemberian vaksin sehingga PSI terlihat secara langsung oleh masyarakat dan cenderung menyasar lapisan masyarakat menengah ke bawah.

PSI telah berhasil mendapatkan imajinasi publik lewat usaha kontroversi dan branding secara *massif* menggunakan seluruh alat komunikasi. Tetapi PSI belum bisa mendapatkan hati konstituen yang mereka tuju. *Party Id* yang kurang baik dan *electoral volatility* lah yang menyebabkan PSI gagal menduduki senayan. *Party Id* sedari awal telah menjadi komitmen PSI dalam usaha *branding* partai.

Sarana memperluas citra partai selanjutnya adalah melalui pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan fungsi partai sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik. Atas dasar tersebut, PSI Kota Malang pun juga memiliki program kerja pendidikan politik. Selain kewajiban sebuah parpol, tetapi PSI Kota Malang juga mempunyai beban untuk menggunakan dana hibah bantuan bakesbangpol untuk pendidikan sebesar 60%.

PSI Kota Malang berhasrat untuk membuat pendidikan politik yang kreatif dan tidak monoton serta pendidikan politik itu tidak harus dilakukan diruangan dan sifatnya formal, jika tidak memiliki keunikan dalam mencitrakan diri di pendidikan politik maka masyarakat hanya datang karena uang saja. Jadi PSI Kota Malang ketika menyelenggarakan pendidikan politik mengolahnya menjadi sesuatu yang tidak menjemukan, sehingga segmentasi atau target pendidikan politik itu dapat tertarik. Seperti diskusi politik dan permasalahan, sarasehan, upacara bendera, lomba billiard, lomba game online serta nongkrong di *coffee shop*.

Terbukti dari ke kreatifan PSI Kota Malang dalam menghadirkan pendidikan politik berbasis informal dan milenial. Tak ayal perlakuan seperti itu tentunya membuat publik menjadi tertarik dan penasaran terutama segmentasi nya yaitu anak muda, milenial dan pemilih pemula. Walaupun dalam peraturan Pemkot Malang serta ambisi PSI Kota Malang untuk tidak mencampur adukan kampanye dan pendidikan politik, pada akhirnya secara tidak langsung PSI membawa citra nya ke dalam pendidikan politik setidaknya dengan pendidikan politik, imajinasi publik, kepopuleran bahkan elektabilitas partai meningkat.

Pelembagaan Partai dalam Kontestasi Politik

Temuan peneliti, Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu serentak 2019 mendapat 2.650.361 atau 1.8 % suara nasional, sedangkan PSI Kota Malang mendapat 19.447 suara atau sekitar 3% dari total DPT Kota Malang. PSI menempati urutan 3 berdasarkan perolehan suara partai baru, diungguli oleh Perindo dan Partai Berkarya. Perolehan suara tersebut membuat PSI gagal mencapai parlemen sehingga disebut Partai Non-Parlemen.

Walaupun gagal di pada pemilihan umum atau pilihan legislative pusat, tetapi di daerah, PSI berhasil menempatkan kadernya ke dalam legislatif daerah, salah satunya adalah Kota Malang. PSI Kota Malang mendapat satu kursi DPRD dengan total keseluruhan 3% yang menjadikan PSI menjadi partai baru yang mendapat kursi paling banyak mendahului Perindo dengan selisih yang lumayan banyak yaitu sekitar 4000 suara.

Dalam konteks pelembagaan partai politik, sedikit banyak dapat memengaruhi perolehan suara yang didapatkan oleh PSI Kota Malang. Pelembagaan Partai Politik milik Randall dan Svasand (2002) secara teoritis memiliki pengaruh dalam perolehan suara pada kontestasi politik khususnya dari segi internal (derajat *Value Infusion*) dan dari segi eksternal (derajat *Reification*).

PSI Kota Malang beranggapan bahwa perolehan suara pada Pileg 2019 cukup memuaskan walaupun harus menelan kepahitan dengan hanya memasukkan satu orang caleg nya saja. Tetapi itu sebuah pencapaian yang bagus mengingat partainya tidak lolos ke senayan dan hanya segelintir DPD saja yang bisa memasukkan caleg nya ke parlemen daerah.

Dari segi internal yaitu *Value Infusion*, sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam perolehan suara bahkan berdampak pada penurunan hasil suara. Peneliti menyimpulkan bahwa derajat *Value Infusion* dalam konteks basis sosial PSI Kota Malang memiliki kecenderungan yang belum bagus. Dikarenakan, PSI Kota Malang belum memiliki basis sosial yang spesifik, hal tersebut menandakan bahwa tidak adanya *key constituent* yang dituju oleh partai sehingga segmentasi pemilih masih beragam.

Kemudian, dari segi eksternal yaitu *Reification* atau imajinasi publik, kualitas kelembagaan PSI Kota Malang terbilang bagus. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut dikarenakan kontroversialnya partai ini melalui isu isu yang dibahas, pernyataan petinggi partai, propaganda, Iklan dan sosialisasi. PSI Kota Malang pun mengikuti jejak DPP tersebut tetapi lebih memakai cara tradisional.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PSI Kota Malang menggunakan cara cara unik dan nyentrik juga berpengaruh besar terhadap perolehan suara. Imajinasi publik terhadap PSI sebagai partai baru yang identik dengan anak muda dan memiliki isu yang tabu pun juga membuat popularitasnya meningkat yang membuat citra nya tertanam di kalangan anak muda.

Kondisi sosial Kota Malang sebagai kota besar dan menuju metropolitan juga berpengaruh pada penerimaan isu dan nilai yang dibawa oleh PSI Kota Malang. Dengan diterimanya nilai dan isu partai, PSI Kota Malang mendapat perolehan suara yang cukup bagus jika dibandingkan dengan partai baru yang lain. Bahkan PSI Kota Malang dianggap

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, studi ini mampu mencapai tujuan penelitian yaitu menganalisis pelembagaan PSI Kota Malang menggunakan persilangan antara dua aspek yang akan memunculkan empat dimensi yang dikemukakan oleh Randall & Svasand (2002) yaitu (1) Systemness (2) Decisional Autonomy (3) Value Infusion (4) Reification.

Hasil penelitian tentang kualitas pelebagaan partai politik pada PSI Kota Malang berdasarkan indikator dan dimensi Teori Pelebagaan Partai Politik Randall dan Svasand, menunjukkan bahwa PSI Kota Malang memiliki pelebagaan yang rendah pada aspek internal dan memiliki pelebagaan yang tinggi pada aspek eksternal. Pelebagaan partai tersebut juga sedikit banyak memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Malang 2019.

Pada level *Systemness* masih menunjukkan hal yang kurang memuaskan, banyak kegiatan dan persoalan administratif yang tidak berpedoman pada aturan, dan nilai nilai yang dipercayai oleh PSI, regulasi kekuasaan yang kurang demokratis hingga wewenang ketua yang terlalu besar.

Pada level *Value Infusion*, hasil pembahasan juga menunjukkan hal yang sama yaitu belum terlaksana secara sempurna. Dari segi penanaman nilai pada seluruh anggota, PSI Kota Malang memiliki poin plus dimana seluruh anggota paham dan menaati nilai dan tujuan yang dibawa partai. Tetapi dari segi hubungan dengan kelas populis/basis sosial, PSI Kota Malang masih memiliki hubungan transaksional dengan kelas populis. Selain itu, PSI Kota Malang juga tidak memiliki basis sosial yang spesifik.

Selanjutnya pada aspek eksternal, PSI Kota Malang menunjukkan hal yang bagus. Pada derajat *Decisional Autonomy*, PSI Kota Malang terkesan independen dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut tak ayal dikarenakan partai belum memiliki jejaring politik yang banyak dengan sumber otoritas dan sumber dana.

Pada derajat imajinasi publik, sudah tidak diragukan lagi bahwa PSI Kota Malang populer dan berhasil menanamkan citra partai sesuai dengan isu dan nilai yang dibawa oleh PSI, walaupun memang harus melewati berbagai rintangan seperti cap partai anti-islam dan hoax lainnya. Sehingga didapat kesimpulan yaitu PSI Kota Malang memiliki model pelebagaan dengan dua derajat tinggi, namun dua derajat lainnya cenderung rendah.

Pada pembahasan terkait pengaruh pelebagaan partai dengan hasil elektoral. Peneliti menemukan pengaruh antara *Value Infusion* dan *Reification* dengan perolehan suara PSI Kota Malang 2019 dimana *Value Infusion* berperan memengaruhi penurunan suara dikarenakan hubungan transaksional antara kelas populis, sedangkan kebalikannya, *Reification* berperan sangat signifikan terhadap peningkatan suara pada partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, dkk. (2022). Rekrutmen Politik Pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I). Jurnal Ilmiah Mugodimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora vol. 6 No 1
- Ferdian. (2018). PSI, Agama dan Politik (Online) <https://news.detik.com/kolom/d-4317481/psi-agama-dan-politik> Diakses pada 23 Juni 2023
- Indikator. (2022). Trust Terhadap Institusi Politik, Isu Isu, Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024. Jakarta: Indikator

- Lutfi, Muhammad. (2012). Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal: (Studi tentang Pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Partai Solidaritas Indonesia. (2014) AD/ART Partai Solidaritas Indonesia: Jakarta
- Partai Solidaritas Indonesia. (2014). ABC Partai Solidaritas Indonesia: Jakarta
- Randall, Vicky and Svasand, Lars. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Journal of Party Politics* Vol. 08, No.1: SagePub
- Rohman, AZF. (2015). Transformasi Pelembagaan PKB (Studi Tentang Proses Pelembagaan Partai Dalam Kasus PKB Dari Era Gus Dur (1998-2007) ke era Muhaemin Iskandar (2008-2014)). Tesis Magister. Universitas Gajah Mada
- Rohman, AZF. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformatif* Vol. 3 No.2
- Romli, L. (2016). Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol 2 No.2
- Romli, Lili. (2012). Kelembagaan Partai Politik Masih Lemah. Universitas Gajah Mada: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah> diakses pada 16 November 2022
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Suryana, Nanang. Ardiansyah dan Manan. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas . *Jurnal Civic Hukum* , Vol 5 No.1. Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019 | *Jurnal Civic Hukum* (umm.ac.id) diakses pada 17 November 2022
- Tantono, Priyowididi dan Vidyarini. (2019). Citra Partai Solidaritas Indonesia di Publik Milenial Surabaya. *Jurnal E-Komunikasi*, Vol.7 No.2
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Wanto, Khikma (2021). Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang). *Jurnal Mozaik*, Vo.13 No.1. PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang) | *Jurnal MoZaiK* (ilearning.co) diakses pada 17 November 2023
- Web Resmi Partai Solidaritas Indonesia. (Online) <https://psi.id/>
- Y-Republica. (2018). Politik Kebohongan Mengancam Pemilu. Jakarta: Y-Republica
- Y-Republica. (2023). Elektabilitas Partai Politik. Jakarta: Y-Republica